BAB III

PROFIL KANTOR DPRD



Logo Kantor DPRD Kab. Cianjur

3.1. Tinjauan Umum Kantor DPRD

Tinjauan umum kantor DPRD Kab Cianjur meliputi sejarah kantor DPRD Kab Cianjur, struktur organisasi, maksud dan tujuan pendirian serta deskripsi kerja yang ada di lingkungan kantor DPRD Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dijelaskan di bawah ini.

3.1.1 Sejarah dan Perkembangan kantor DPRD Kab Cianjur Provinsi Jawa Barat

Kata Cianjur (Tjiandjoer) muncul dalam sejarah baru pada tanggal 20 Januari 1678. Pusat aktivitas saat itu berada di Cikalong

Kulon yang berjarak sekitar 15 km dari ibukota Kabupaten Cianjur

sekarang. Saat itu pemerintahan dipimpin Raden Aria Wiratanu I. Menurut sejarah, Aria Wiratanu berasal dari kesultanan Cirebon yang

dibawa Aria Wangsa Goparana.

Turunan yang memerintah Cianjur berasal dari Aria Wangsa Goparana. Dia pula yang mendirikan Nagari Cianjur (Sansekerta: desa, Belanda: Negorij). Aria Wangsa Goparana yang menurunkan

para Bupati Cianjur yang bergelar Aria Witanu Datar sampai Wiratanu Datar VI (tahun 1776-1833).

Semasa Bupati Aria Witanu Datar II (tahun 1692-1707), pusat pemerintahan berpindah dari Cikalong Kulon ke Pamoyanan di sekitar sungai Cianjur bagian barat pusat pemerintahan kabupaten sekarang. Sementara itu, Aria Witanu Datar III (tahun 1707-1727) memindahkan kembali ibukota pemerintahannya dari Pamoyanan ke ibukota saat ini. Sekarang, kalau dilihat jaraknya hanya dibatasi oleh sungai Cianjur, akan tetapi pada saat itu kemungkinan sungainya

masih alami serta hutan belukar sehingga pemindahan ibukota itu tetap punya batas yang berpengaruh.

3.1.2 PENATAAN RUANG CIANJUR

Kota Cianjur hingga kini masih dikelilingi areal pertanian (sawah). Ketika Rencana Induk Kota (RIK) pada tahun 1974 disusun, kota ini berkembang secara alami. Peninggalan infrastruktur berupa jalan-jalan utama yang dirancang membujur dari barat ke timur mengesankan nuansa Islami. Di samping itu, keberadaan alun-alun, pusat kantor pemerintahan, rumah jabatan Bupati dan mesjid agung menjadi bukti sejarah penataan kota yang memadukan nilai-nilai Islam.

Dari jalan-jalan utama inilah kemudian berkembang perumahan penduduk di sisi kiri kanan. Infrastruktur ini, dibangun pada masa kepemimpinan Aria Wiratanu Datar V (tahun 1761-1776).

Menyikapi perkembangan pembangunan dan pertumbuhan kota dan aktivitas ekonomi yang makin cepat, pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan dalam mengatur urusan-urusan masyarakat (publik) berkewajiban mengeluarkan aturan main berupa. Peraturan Daerah. Berkenaan dengan pengaturan tata ruang, produk pertama yang dihasilkan adalah RIK Kota Cianjur. RIK ini diajukan

sebagai bahan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian menyangkut penggunaan ruang.

RIK atau Master Plan Kota Cianjur sekaligus menjadi produk hukum pertama yang mengatur tata ruang di Cianjur. RIK ini telah ditetapkan DPRD Kabupaten Cianjur menjadi Peraturan Daerah nomor 2 tahun 1974. Ada pun luas wilayah kota Cianjur adalah 868 Ha meliputi 6 jumlah Desa/Kelurahan.

Berdasarkan hirarki peraturan saat itu, sebelum diberlakukan sebagai hukum yang mengikat, terlebih dulu harus mendapat pengesahan Gubernur Propinsi Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri. Karena birokrasi yang berbelit, hingga kini Perda tersebut tidak mendapatkan pengesahan Menteri Dalam Negeri. Meski demikian. Perda tersebut sudah memberi gambaran bahwa perencanaan penataan ruang yang sudah dibuat telah menerapkan kaidah tata ruang.

RIK ini dibuat atas kerja sama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cianjur dengan Intitut Teknologi Bandung. Kerja sama dilakukan karena kemampuan staf Pemda masih terbatas, tetapi memiliki wewenang untuk membuat perencanaan daerah. Sementara itu, kemampuan SDM ITB sangat berhubungan dengan pekerjaan ini, tetapi ketersediaan data tentang Cianjur terbatas.

3.1.3 Maksud Dan Tujuan Pendirian

Mengembangkan kota yang pesat Revisi terhadap rencana tata ruang dilakukan minimal sekali dalam 5 tahun. Hal ini mengingat beberapa hal strategis dan struktural terkadang tidak terakomodasi dalam perencanaan, sehingga perlu diakomodasikan melalui revisi. Di samping itu, perkembangan kota terkadang luput dari perencanaan, sehingga menyebabkan rencana tata ruang tidak mampu menangkap dinamika perkembangan kota.

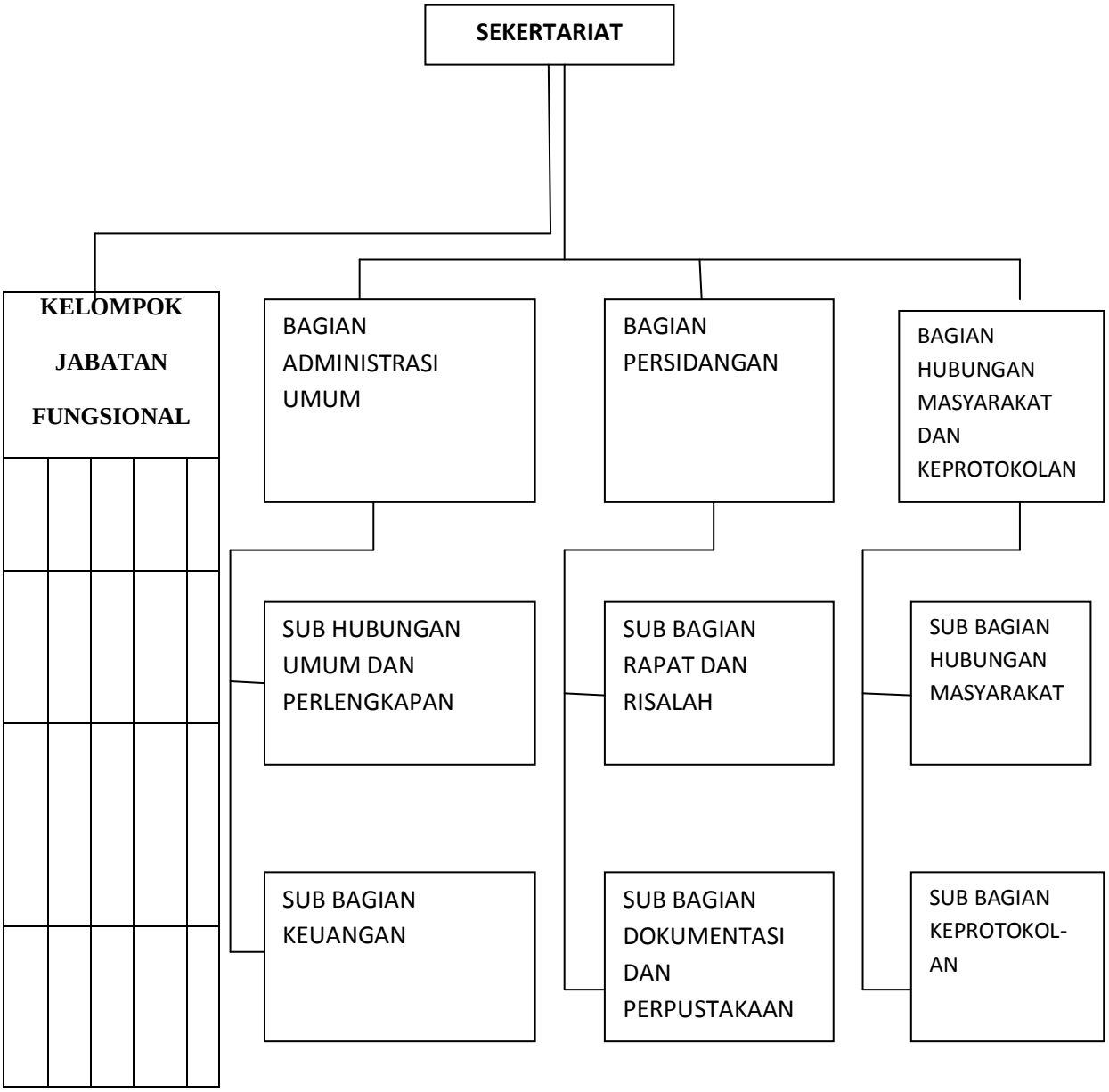
Menyikapi perkembangan pembangunan dan pertumbuhan kota dan aktivitas ekonomi yang makin cepat, pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan dalam mengatur urusan-urusan masyarakat (publik) berkewajiban mengeluarkan aturan main berupa Peraturan Daerah. Berkenaan dengan pengaturan tata ruang, produk pertama yang dihasilkan adalah RIK Kota Cianjur. RIK ini diajukan sebagai bahan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian menyangkut penggunaan ruang.

3.1.4 Struktur Organisani kantor DPRD Kab.Cianjur

Struktur organisasi merupakan hubungan antara pemerintah kabupaten dan anggota DPRD yang menggambarkan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab suatu kelompok kerja. Struktur organisasi selalu tergantung pada luasnya bidang pekerjaan, dalam struktur organisasi

akan terlihat jelas karena digambarkan dalam badan organisasi yang membuat kedudukan dan status fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKERTARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



3.1.5 Deskripsi Kerja

1. SEKERTARIAT

Bertugas untuk mengawasi semua bagian Sebagai berikut :

a. BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

b. BAGIAN PERSIDANGAN

c. BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KEPROTOKOLAN

d. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

2. Kabag Administrasi Umum

Bertugas untuk menangani semua bagian Sebagai berikut :

a. SUB HUBUNGAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

b. SUB BAGIAN KEUANGAN

3. **Kabag Persidangan**

Bertugas untuk menangani semua bagian Sebagai berikut :

a. SUB BAGIAN RAPAT DAN RISALAH

b. SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN

4. **Kabag Hubungan Masyarakat Dan Keprotokolan**

Bertugas untuk menangani semua bagian Sebagai berikut :

a. SUB BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

b. SUB BAGIAN KEPROTOKOLAN